

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 254 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 4 TAHUN 2003
TENTANG IZIN BANGUNAN.

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Izin Bangunan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Izin Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727).

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-2MK.7/2009 tanggal 14 Agustus 2009 Perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Izin Bangunan, dengan alasan :

1. Terhadap bangunan kantor pemerintah maupun pemerintah daerah, dikecualikan dari objek retribusi IMB sesuai Penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) sudah termasuk dalam IMB, dan tidak memerlukan izin tersendiri, sehingga tidak dapat dikenakan retribusi;
3. Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) tidak diperlukan sehingga tidak dapat dikenakan retribusi;
4. Izin mendirikan bangunan diberikan agar kegiatan pembangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis bangunan, dan IMB bukan merupakan bukti kepemilikan bangunan sehingga tidak memerlukan balik nama atau pemecahan IMB;
5. Besarnya biaya administrasi dan survey harus ditetapkan dengan Perda sesuai Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

KEDUA : Agar Walikota Dumai menghentikan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Izin Bangunan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2009

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

GAMAWAN FAUZI

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Gubernur Riau;
7. Ketua DPRD Kota Dumai.